

**PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



PT. JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

	<u>Halaman</u>
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014.....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 dan 2014	2
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 dan 2014	3
Laporan Arus Kas untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 dan 2014	4
Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015 dan 2014	
Informasi Umum.....	5-6
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan.....	7-19
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	20-33
Lampiran	
Lampiran 1. Laporan Posisi Keuangan Konvensional.....	34
Lampiran 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konvensional.....	35
Lampiran 3. Laporan Perubahan Ekuitas Konvensional.....	36
Lampiran 4. Laporan Arus Kas Konvensional.....	37
Lampiran 5. Laporan Posisi Keuangan Unit Usaha Syariah.....	38
Lampiran 6. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Unit Usaha Syariah.....	39
Lampiran 7. Laporan Perubahan Ekuitas Unit Usaha Syariah.....	40
Lampiran 8. Laporan Arus Kas Unit Usaha Syariah.....	41



PT JAMKRIDA JABAR

Jl. Soekarno Hatta no. 592 Bandung
Telp. (022) 7504777, 7506307
Fax. (022) 7563333
E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
PT. JAMKRIDA JABAR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Tri Budhi Muljawan
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta No 592 Bandung

- Nama : Budi Setyono
- Jabatan : Direktur Keuangan
- Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta No 592 Bandung

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar;
2. Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi


Tri Budhi Muljawan **Budi Setyono**
Direktur Utama Direktur Keuangan

Bandung, 10 Maret 2016



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor: LAI/GA/HA/16011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Jabar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lainnya

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 14 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja" yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2015, dan secara retrospektif menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi



Drs. Husni Arvan, CA, CPA

Izin Praktik : No. AP.0071

Izin KAP : No. KEP-662/KM.17/1998

10 Maret 2016

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014*
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	150,074,648,347	99,818,053,661
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2e, 4	834,640,738	333,679,599
Beban Dibayar Dimuka	2f, 5	10,451,358,141	5,182,150,938
JUMLAH ASET LANCAR		161,360,647,226	105,333,884,198
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2g, 6	11,366,309,917	1,071,771,980
<i>setelah dikurangi akumulasi penyusutan berturut-turut sebesar Rp885.705.684 dan Rp509.036.641 per 31 Desember 2015 dan 2014</i>			
Aset Pajak Tangguhan	2m, 15c	3,826,640,610	2,728,398,007
Aset Lain-Lain	2h, 7	243,680,058	7,437,826,998
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		15,436,630,585	11,237,996,985
JUMLAH ASET		176,797,277,811	116,571,881,183
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	2m, 15a	165,569,389	19,826,153
Utang Regaransi	8	520,837,775	233,583,481
Beban Yang Masih Harus Dibayar	9	185,041,736	261,465,595
Penampungan Sementara	10	2,777,440,554	1,453,938,256
Utang Lancar Lainnya	11	11,355,016	246,435,696
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		3,660,244,470	2,215,249,181
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima Dimuka	12	21,595,087,626	10,764,123,214
Cadangan Klaim	2p, 13	2,631,976,826	901,401,723
Liabilitas Jangka Panjang	2l, 14	694,016,492	83,105,511
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		24,921,080,944	11,748,630,448
JUMLAH LIABILITAS		28,581,325,414	13,963,879,629
EKUITAS			
Modal	16	145,200,000,000	100,200,000,000
<i>Modal dasar 30.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 14.520 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar saham.</i>			
Cadangan Umum	16	846,259,220	-
Saldo Laba	16	2,133,489,414	2,386,623,549
Keuntungan pengukuran kembali			
imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	14	36,203,763	21,378,005
JUMLAH EKUITAS		148,215,952,397	102,608,001,554
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		176,797,277,811	116,571,881,183

* Setelah Penyajian Kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014*
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan	2n, 2j, 17	15,570,601,174	6,300,164,188
Beban <i>Fee Based Income</i> Bank	2n, 2j, 17	(40,131,115)	(20,498,694)
Beban Komisi Agen	2n, 2j, 17	(2,016,810,975)	(732,507,308)
Restitusi IJP	2n, 2j, 17	(323,926,561)	(53,179,740)
Manajemen <i>Fee</i>	2n, 2j, 17	422,572,067	191,644,192
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		13,612,304,590	5,685,622,638
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2j, 2o, 19	(4,319,411,113)	(913,359,561)
Beban Cadangan Klaim	2j, 2p, 19	(1,730,575,103)	(677,696,449)
Beban Regaransi	2j, 19	(4,508,530,386)	(1,999,441,553)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(10,558,516,602)	(3,590,497,563)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		3,053,787,988	2,095,125,075
PENDAPATAN INVESTASI	2j, 18	9,530,949,051	9,788,727,309
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		12,584,737,039	11,883,852,384
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	2j, 20	(1,043,438,276)	(823,144,129)
Beban Sumber Daya Manusia	2j, 20	(7,019,827,177)	(5,843,122,128)
Beban Administrasi dan Umum	2j, 20	(1,832,071,480)	(1,414,672,148)
JUMLAH BEBAN USAHA		(9,895,336,933)	(8,080,938,405)
LABA USAHA		2,689,400,106	3,802,913,979
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	2j, 21	255,269,328	73,495,228
Beban Non Operasional	2j, 21	-	(5,907,183)
JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL		255,269,328	67,588,045
LABA SEBELUM PAJAK		2,944,669,434	3,870,502,024
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2m, 15b	(1,914,364,542)	(1,966,120,104)
Manfaat Pajak Tangguhan	2m, 15c	1,103,184,522	1,147,842,733
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(811,180,020)	(818,277,371)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		2,133,489,414	3,052,224,654
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	14	19,767,677	28,504,007
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	14	(4,941,919)	(7,126,002)
JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI		14,825,758	21,378,005
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	14	-	-
JUMLAH POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI		-	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SELAMA TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		14,825,758	21,378,005
LABA KOMPREHENSIF		2,148,315,172	3,073,602,659

* Setelah Penyajian Kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	Modal Disetor	Ditentukan Penggunaannya		Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
			Cadangan Umum	Cadangan Tujuan			
Saldo 1 Januari 2014		100,200,000,000	-	-	-	(665,601,104)	99,534,398,896
Laba Bersih Tahun Berjalan	16	-	-	-	-	3,052,224,653	3,052,224,653
Keuntungan pengukuran kembali imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	16	-	-	-	21,378,005	-	21,378,005
Saldo per 31 Desember 2014		100,200,000,000	-	-	21,378,005	2,386,623,549	102,608,001,554
Saldo 1 Januari 2015		100,200,000,000	-	-	21,378,005	2,386,623,549	102,608,001,554
Modal Disetor	16	45,000,000,000	-	-	-	-	45,000,000,000
Cadangan - Cadangan							
Cadangan Umum	16	-	846,259,220	-	-	(846,259,220)	-
Cadangan Khusus	16	-	-	-	-	-	-
Pembagian Deviden	16	-	-	-	-	(1,078,255,031)	(1,078,255,031)
Pembagian Laba	16	-	-	-	-	(462,109,299)	(462,109,299)
Laba Bersih Tahun Berjalan	16	-	-	-	-	2,133,489,414	2,133,489,414
Keuntungan pengukuran kembali imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	16	-	-	-	14,825,758	-	14,825,758
Saldo per 31 Desember 2015		145,200,000,000	846,259,220	-	36,203,763	2,133,489,414	148,215,952,397

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan	2n, 2j, 12, 17	24,443,269,002	13,710,383,443
Pembayaran Klaim	2j, 2o, 8, 19	(8,542,643,755)	(2,789,880,455)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok	9, 10, 11, 20, 21	(12,888,018,535)	(6,597,241,460)
Pembayaran Pajak Penghasilan	2m, 15a, 15b, 15c	(1,763,679,387)	(2,012,859,270)
Pendapatan dari Investasi	2j, 2e, 4, 18	9,029,987,912	9,670,807,767
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI		10,278,915,237	11,981,210,025
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pengadaan Aset Tetap	2g, 6	(10,671,206,980)	(127,866,740)
Aset Dalam Penyelesaian	2h, 7	7,174,425,000	(7,239,425,000)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		(3,496,781,980)	(7,367,291,740)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kenaikan Modal Disetor	16	45,000,000,000	-
Pembagian Dividen	16	(1,078,255,031)	-
Pembagian Laba	16	(462,109,299)	-
Keuntungan OCI	16	14,825,758	-
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		43,474,461,428	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		50,256,594,685	4,613,918,285
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		99,818,053,661	95,204,135,376
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		150,074,648,347	99,818,053,661

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh ijin-ijin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 20/DP/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Surat Izin Walikota Bandung Tentang Izin Gangguan/Kartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IG-840/BPPT tanggal 11 Desember 2012 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618483 tanggal 11 Desember 2012 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanaan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buahbatu Bandung, Jawa Barat 40286.

Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah.

Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 55 tanggal 30 April 2015, Pemegang Saham menerima permohonan pengunduran diri Tuan Iggi Haruman Achsien dari jabatan komisaris serta menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Syafrial Firdaus sebagai Komisaris, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat.

Susunan Pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Wakil Ketua : Khozin Abu Faqih, Lc.

Komisaris

Komisaris Utama : Rodhiallah
Komisaris : Teguh Budiman
Komisaris : Syafrial Firdaus

Direksi

Direktur Utama : Tri Budhi Muljawan
Direktur Keuangan : Budi Setyono
Direktur Operasional : Asep Gunawan Sirad

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 04 tanggal 14 Mei 2014, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Tri Budhi Muljawan sebagai Direktur Utama dan Tuan Budi Setyono sebagai Direktur Keuangan, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2017 untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016.

2014:

Komisaris

Komisaris Utama : Rodhiallah
Komisaris : Teguh Budiman
Komisaris : Iggi Haruman Achsien

Direksi

Direktur Utama : Tri Budhi Muljawan
Direktur Keuangan : Budi Setyono
Direktur Operasional : Asep Gunawan Sirad

Jumlah karyawan Perusahaan pada 31 Desember 2015 adalah sebanyak 31 orang dan pada 31 Desember 2014 adalah sebanyak 29 orang.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan harus menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

c. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan pada catatan ini.

Standar Akuntansi Baru

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 adalah:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No.1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
- PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK 66, "Pengaturan Bersama"
- PSAK 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

Perusahaan telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian kecuali yang dijelaskan di bawah ini.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

i. Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perusahaan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

ii. Pengukuran nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK NO. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menerapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK NO. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas perusahaan.

iii. Imbalan Kerja

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (*non-vested*) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan (*vested*).

Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK 24 (Revisi 2013), Perusahaan mengakui beban jasa lalu yang belum diakui pada awal penerapan standar ini sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba, masing masing pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 dan penyesuaian terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No.60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

Revisi PSAK No. 55 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar (pembelian yang lazim/regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- **Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- **Aset keuangan yang tersedia untuk dijual**

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan *non derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

- i. Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.
- ii. Investasi pada instrumen utang yang tidak ditujukan untuk dimiliki sampai jatuh tempo diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, dan dicatat pada nilai wajar.

2. Penurunan nilai dari aset

Perusahaan melakukan penilaian pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Penurunan nilai dari aset (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurang melalui akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari utilisasi dari jaminan deposit yang diberikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.

Estimasi tahun antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu berdasarkan jenis pelanggan.

Arus kas masa datang dari aset keuangan Perusahaan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada tahun terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada tahun historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan, dikreditkan pada cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan, dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

3. Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan memiliki kedua jenis liabilitas keuangan. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

3. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan Awal (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

i. **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.**

Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai akun "Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar *Derivatif - Neto*".

ii. **Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. **Penentuan Nilai Wajar**

Mulai tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran dipasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perusahaan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar atau risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dan masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan aktif dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam menetapkan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang) atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang perusahaan yakin bahwa ketelibatan suatu pasar pihak ketiga akan akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset keuangan dan posisi *long* diukur menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan posisi *short* diukur menggunakan harga permintaan. Jika perusahaan memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka perusahaan dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka bersih (*net open position*) mana yang lebih sesuai.

5. Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset yang masih dimiliki, perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak lagi cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

6. Penyesuaian risiko Kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

7. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Perusahaan tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo (melebihi jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo) kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

7. Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

- dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok awal aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau
- dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap diakui dalam komponen ekuitas.

Sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dimana pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

8. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

9. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggung mitra regaransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra regaransi. Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang regaransi tatkala mitra regaransi mengaksep piutang dalam penyelesaian tersebut (sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT JAMKRIDA JABAR dengan mitra regaransi), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan tiap-tiap piutang pada akhir tahun.

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban regaransi dibayar di muka dialokasikan secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang terkait dengan regaransi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aktiva", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

h. Aset Lain-Lain

1) Piranti Lunak Komputer/Software

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Lain-Lain (lanjutan)

1) Piranti Lunak Komputer/*Software* (lanjutan)

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead* yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dan 4 tahun).

2) Aset Lainnya

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

i. Sewa

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dan diakui atas dasar akrual (*accrual basis*) kecuali untuk imbal hasil atas penempatan dana dengan pola syariah dicatat dan diakui atas dasar kas (*cash basis*). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*) Pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah Komite Klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dimana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

m. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini". Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal neraca.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

n. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui pada saat Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) disajikan secara bruto.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

o. Utang Klaim

Utang klaim merupakan hutang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah hutang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Hutang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

p. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,25% dari *outstanding* penjaminan. Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 9, yaitu minimal sebesar 0,25% dari *outstanding* penjaminan yang ditanggung Perusahaan.

Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

q. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
 - Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

r. Informasi Segmen

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen", Perusahaan menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis. Sesuai dengan struktur organisasi dan manajemen serta sistem pelaporan internal Perusahaan, informasi segmen primer disajikan berdasarkan segmen usaha dan informasi segmen sekunder disajikan berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Kas	45,999,414	85,468,658
Giro Bank		
Pihak Berelasi		
Bank BJB	607,720,313	345,046,078
Bank BJB Syariah	385,149,659	-
Pihak Ketiga		
Bank Giro Yudha Bhakti	2,059,824	2,500,162
Bank Saudara	-	19,550
Bank Artos	9,985,464	1,473,710
Bank Danamon	510,228	1,446,958
Bank BNI	9,034,162	4,917,836
Bank Syariah Mandiri	31,917,354	1,915,180
Bank Muamalat	25,100,000	-
Bank Panin Syariah	16,524,444	-
Jumlah Giro Bank	1,088,001,448	357,319,474
Tabungan		
Pihak Berelasi		
Bank BJB	5,304,566	20,500,853
Pihak Ketiga		
BPR Kab Bandung (Soreang)	2,047,720	487,117
BPR Cagak	28,741,438	3,853,410
BPR Kota Garut	67,996	5,560,612
BPR Astanajapura	62,623,740	9,389,006
BPR Pasar Bogor	30,706,020	2,702,139
BPR Parung Panjang	3,032,184	2,964,145
BPR Pancoran Mas	1,666,780	1,619,126
BPR Leuwi Liang	9,564,413	5,277,584
BPR Sukra	8,563,325	8,174,469
BPR Cipatujah	7,256,498	6,943,632
BPR Kroya	3,830,714	3,729,447
BPR Balongan	4,493,063	4,237,850
BPR Cantigi	10,704,645	8,171,127
BPR Bongas	1,030,157	702,461
BPR Garut	292,954,132	-
BPR Sukahaji	121,781,160	-
BPR Ukabima	13,173,423	-
Jumlah Tabungan	607,541,974	84,312,978
Deposito		
Pihak Berelasi		
Bank BJB	77,683,105,511	54,910,952,551
Bank BJB Syariah	18,050,000,000	6,500,000,000
Pihak Ketiga		
Bank Syariah Mandiri	2,500,000,000	-
Bank BTPN	-	2,000,000,000
Bank Artos	12,000,000,000	11,000,000,000
Bank Danamon	10,000,000,000	-
Bank BNI	1,000,000,000	3,000,000,000
Bank Mega	10,000,000,000	-
Bank Muamalat	3,500,000,000	11,000,000,000
Bank Yudha Bhakti	-	4,000,000,000
Bank Mayapada	2,000,000,000	1,000,000,000

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Bank Panin Syariah	5,000,000,000	2,100,000,000
Jumlah Deposito (dipindahkan)	141,733,105,511	95,510,952,551

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2015	2014
Kas (pindahan)	45,999,414	85,468,658
Jumlah Giro Bank (pindahan)	1,088,001,448	357,319,474
Jumlah Tabungan (pindahan)	607,541,974	84,312,978
Jumlah Deposito (pindahan)	141,733,105,511	95,510,952,551
BPR Duta Pasundan	500,000,000	500,000,000
BPR Jalancagak Subang	300,000,000	300,000,000
BPR LPK Garut	150,000,000	150,000,000
BPR Bumi Bandung Kencana	2,000,000,000	1,500,000,000
BPR Astanajapura	950,000,000	800,000,000
BPR Pancoranmas	50,000,000	50,000,000
BPR Parungpanjang	200,000,000	200,000,000
BPR Leuwiliang	100,000,000	100,000,000
BPR Sukra	-	50,000,000
BPR Cipatujah	-	80,000,000
BPR Cantigi	100,000,000	50,000,000
BPR Garut	1,250,000,000	-
BPRS HIK	1,000,000,000	-
Jumlah Deposito	148,333,105,511	99,290,952,551
Jumlah Kas dan Setara Kas	150,074,648,347	99,818,053,661

Pada tahun 2014 pendapatan deposito berjangka tersebar di beberapa perbankan dengan tingkat suku bunga yang beragam dari 8,5 % p.a. s/d 10,5 % p.a. Sedangkan pada bulan Desember 2015 tersebar di beberapa perbankan dengan tingkat suku bunga yang beragam dari 5,50 % p.a. s/d 10,75 % p.a.

4. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Pendapatan Bunga Deposito	395,370,969	197,314,411
Pendapatan <i>Management Fee</i>	33,962,048	-
Piutang Regaransi	405,307,721	136,365,188
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	834,640,738	333,679,599

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga deposito dan piutang regaransi atas klaim dan restitusi kepada Perusahaan Reasuransi PT Nasional Reasuransi Indonesia.

5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari :

	2015	2014
Asuransi Kendaraan	-	28,202,703
Asuransi Gedung	45,036,000	-
Sewa Kendaraan	12,000,000	12,000,000
IJP regaransi	7,507,374,445	3,706,507,036

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

<i>Fee Based Income</i> Bank	60,150,756	40,546,423
Komisi Agen/Broker	2,823,921,430	1,375,789,627
Piutang Lainnya	2,875,510	2,850,000
Beban Adm & Umum Lainnya	-	16,255,149
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	10,451,358,141	5,182,150,938

5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP regaransi, IJK regaransi dan *fee based income* bank dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK). Dengan mempertimbangkan banyaknya pinjaman yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun.

Beban dibayar dimuka regaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra regaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK regaransi dan *fee based income* bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

6. ASET TETAP

Aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari :

	Saldo 31 Desember 2014 Rp	Mutasi tahun 2015		Saldo 31 Desember 2015 Rp
		Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	532,558,621	861,789,730	-	1,394,348,351
Kendaraan	1,048,250,000	-	-	1,048,250,000
Gedung	-	6,345,917,250	-	6,345,917,250
Tanah	-	3,463,500,000	-	3,463,500,000
Jumlah	1,580,808,621	10,671,206,980	-	12,252,015,601
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(144,294,141)	(171,550,066)	-	(315,844,207)
Kendaraan	(364,742,500)	(157,237,500)	-	(521,980,000)
Gedung	-	(47,881,477)	-	(47,881,477)
Tanah	-	-	-	-
Jumlah	(509,036,641)	(376,669,043)	-	(885,705,684)
Nilai buku	1,071,771,980			11,366,309,917
	Saldo 31 Desember 2013 Rp	Mutasi tahun 2014		Saldo 31 Desember 2014 Rp
		Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	404,906,881	127,651,740	-	532,558,621
Kendaraan	1,048,250,000	-	-	1,048,250,000
Jumlah	1,453,156,881	127,651,740	-	1,580,808,621
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(53,133,556)	(91,160,585)	-	(144,294,141)
Kendaraan	(207,505,000)	(157,237,500)	-	(364,742,500)
Jumlah	(260,638,556)	(248,398,085)	-	(509,036,641)
Nilai buku	1,192,518,325			1,071,771,980

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Aset tetap sudah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebongkaran, gempa bumi, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa semua aset tetap tersebut relatif aman. Aset tetap disusutkan setelah dikurangi dengan nilai residu dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Pada tahun 2015 terjadi penambahan Aset Tetap berupa tanah, bangunan dan inventaris kantor untuk PT Jamkrida Jabar Konvensional dan Unit Usaha Syariah. Dimana aset tersebut direklas dari Aset Dalam Penyelesaian pada 2014 ke Aset Tetap pada 2015.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap Perusahaan. Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban usaha dan pembenanan untuk tahun 2015 dan 2014 berturut-turut sebesar Rp259.123.756 dan Rp376.669.043.

7. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari :

	2015	2014
<i>Software</i>	183,887,755	113,887,755
Aset Lainnya	175,000,000	175,000,000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	358,887,755	288,887,755
<i>Akumulasi Amortisasi Software</i>	(78,645,197)	(32,673,257)
<i>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</i>	(101,562,500)	(57,812,500)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(180,207,697)	(90,485,757)
Nilai Buku Aset Lain-Lain	178,680,058	198,401,998
Aset Dalam Penyelesaian		
Gedung Dalam Proses	-	7,104,425,000
Pembuatan Aplikasi <i>Software</i> Dalam Proses	65,000,000	135,000,000
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian	65,000,000	7,239,425,000
Jumlah Aset Lain-Lain	243,680,058	7,437,826,998

Software adalah pengeluaran untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak computer atau pengeluaran untuk membuat perangkat lunak computer oleh pihak ketiga dikapitalisir dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan saldo pengeluaran untuk memperoleh pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar, dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis

Pada tahun 2015 terjadi pengurangan aset lain-lain diakibatkan adanya reklas dari Aset Dalam Penyelesaian ke Aset Tetap berupa tanah, bangunan dan inventaris kantor untuk PT Jamkrida Jabar Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

8. UTANG REGARANSI

Utang regaransi per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
<i>Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)</i>	520,837,775	233,583,481
Jumlah Utang Regaransi	520,837,775	233,583,481

Utang kepada *Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)* merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari :

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	2015	2014
Biaya Notaris	-	95,062,500
Aplikasi IJP	-	7,000,000
Aplikasi Syariah	-	52,000,000
Uang Lembur Karyawan	-	22,692,095
Biaya Keamanan, Parkir, AMDK dan Koran	-	1,861,000
Pengadaan Kalender 2014	-	82,850,000
Software Akuntansi Syariah	26,000,000	-
PT Skala Cipta renovasi gedung	29,500,000	-
Uang Makan, Transport, Uang Lembur Karyawan	15,042,601	-
Biaya Aktuaria	4,400,000	-
Biaya Percetakan Buku Agenda PT Jamkrida Jabar	21,875,000	-
Biaya Jasa Pengamanan Trisula	19,201,490	-
Biaya Komisi Agen	69,022,645	-
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	185,041,736	261,465,595

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, dan uang makan, transport, uang lembur karyawan, dan biaya komisi agen bulan Desember 2015 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

10. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Penampungan Sementara IJP - Bank BJB	2,049,541,897	1,321,990,643
Penampungan Sementara IJP - Bank BPR	537,802,403	111,821,078
Penampungan Sementara IJP - Bank Artos	9,107,101	18,536,535
Penampungan Sementara IJP - Bank Yudha Bhakti	-	1,590,000
Penampungan Sementara IJP - Bank Syariah Mandiri	26,270,000	-
Penampungan Sementara IJP - Bank BJB Syariah	137,240,450	-
Penampungan Sementara IJP - Bank Panin Syariah	1,178,000	-
Jumlah Penampungan Sementara IJP	2,761,139,851	1,453,938,256
Penampungan Sementara Subrogasi	16,300,703	-
Jumlah Penampungan Sementara Subrogasi	16,300,703	-
Jumlah Penampungan Sementara	2,777,440,554	1,453,938,256

Akun dalam penyelesaian imbal jasa penjaminan kredit eksisting terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak regaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

11. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Utang Kendaraan Jatuh Tempo Kurang dari 1 tahun	-	239,854,992
Pembayaran Premi BPJS	11,355,016	6,580,704
Jumlah Utang Lancar Lainnya	11,355,016	246,435,696

Merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun terdiri dari premi BPJS.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

12. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah - Pihak Berelasi	19,250,187,710	8,901,616,021
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah - Pihak Ketiga	2,344,899,916	1,862,507,193
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	21,595,087,626	10,764,123,214

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka dan Imbalan Jasa Kafalah akan diakui sebagai pendapatan IJP dan pendapatan IJK selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan dan Imbal Jasa Kafalah diterima dimuka adalah 4 (empat) tahun.

13. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari :

	2015	2014
Saldo Awal	901,401,723	223,705,274
Penambahan Cadangan Klaim	1,730,575,103	677,696,449
Pengurangan Cadangan Klaim	-	-
Jumlah Cadangan Klaim	2,631,976,826	901,401,723

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,25% dari *outstanding* penjaminan dan kafalah. Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 6/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 9, yaitu minimal sebesar 0,25% dari *outstanding* penjaminan yang ditanggung Perusahaan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

14. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari :

	2015	2014
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	108,516,492	83,105,511
Cadangan Purna Jabatan	585,500,000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	694,016,492	83,105,511

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 55 tanggal 30 April 2015, para pemegang saham menyetujui adanya Uang Purna Jabatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan perhitungan (3) tiga kali gaji dan tunjangan pada bulan berakhir dikalikan total bulan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan.

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuarial Indonesia No. XXX / TEK - AI / I / 2016 tanggal 12 Januari 2016.

a. Rekonsiliasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	2015	2014
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	108,516,492	83,105,511
Nilai Wajar setiap Aset Program	-	-
Status Pendanaan	108,516,492	83,105,511
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial yang belum Diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui - Non Vested	-	-
Kewajiban (Aset) yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan	108,516,492	83,105,511

14. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	2015	2014*
Kewajiban (aset) awal periode	83,105,511	60,952,552
Beban yang diakui di laba/rugi	45,178,658	50,656,967
Biaya (Pendapatan) Komprehensif Lainnya	(19,767,677)	(28,504,007)
Pembayaran iuran	-	-
Pembayaran Manfaat - Termasuk (PPK) / Efisiensi	-	-
Pembayaran Manfaat - UUK	-	-
Kewajiban (Aset) akhir periode	108,516,492	83,105,512

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

c. Rekonsiliasi Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	2015	2014*
Biaya Jasa Kini	38,114,690	45,171,238
Biaya Bunga	7,063,968	5,485,729
Hasil yang Diharapkan dari Aset Program	-	-
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial yang Diakui	-	-
Biaya Pemutusan Hubungan Kerja	-	-
Biaya Jasa Lalu <i>Vested</i> yang Belum Diakui	-	-
Amortisasi Biaya Jasa Lalu - <i>Non Vested</i>	-	-
Dampak Kurtailmen atau Penyesuaian	-	-
Beban yang diakui di laba rugi	45,178,658	50,656,967

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuarial

	2015	2014*
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui pada awal periode akuntansi	-	-
Keuntungan (kerugian) aktuarial - kewajiban	19,767,677	28,504,007
Keuntungan (kerugian) aktuarial - aktiva program	-	-
Subtotal	19,767,677	28,504,007
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui dari PEB	(18,723,026)	(27,879,289)
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui dari OLTEB	(1,044,651)	(624,718)
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui dari <i>Curtailment/Settlement</i>	-	-
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui pada OCI	(19,767,677)	(28,504,007)

Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui pada akhir periode akuntansi

- -

e. Biaya (Pendapatan) Komprehensif Lainnya yang diakui (OCI)

	2015	2014*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari kewajiban	(19,767,677)	(28,504,007)
Perubahan lainnya	-	-
Biaya (Pendapatan) Komprehensif Lainnya yang Diakui (OCI)	(19,767,677)	(28,504,007)

f. Akumulasi Biaya (Pendapatan) Komprehensif Lainnya yang diakui (OCI)

	2015	2014*
OCI pada awal periode	(28,504,007)	-
OCI pada periode berjalan	(19,767,677)	(28,504,007)
OCI pada akhir periode	(48,271,684)	(28,504,007)

* Setelah Penyajian Kembali

14. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

g. Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2015 dan 2014 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

		2015	2014
Tingkat Diskonto	:	9%	8.5%
Kenaikan Gaji per Tahun	:	3%	3%
Tabel Mortalita	:	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat Cacat	:	10% TMI 2011	10% TMI 2011
Usia Pensiun Normal	:	55 tahun	55 tahun

15. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
<u>Konvensional</u>		
PPh 4 ayat 2	79,074,194	-
PPh Pasal 21	74,873,294	15,659,808
PPh Pasal 23	10,713,952	4,166,345
Sub Jumlah	164,661,440	19,826,153
<u>Syariah</u>		
PPh Pasal 21	907,949	-
Sub Jumlah	907,949	-
Jumlah Utang Pajak	165,569,389	19,826,153

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2015 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai

	2015	2014
<u>Konvensional</u>		
Laba Sebelum Pajak	2,370,701,791	3,899,006,031
Perbedaan Temporer:		
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(139,673,295)	39,146,175
Kenaikan Cadangan Klaim	1,694,117,359	677,696,449
Kenaikan Imbalan Purna Jabatan	669,878,456	-
Beban Imbalan Pasca Kerja	45,178,658	22,152,960
Jumlah	2,269,501,178	738,995,584

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak (lanjutan)

<u>Konvensional (lanjutan)</u>	2015	2014
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	368,226,539	339,724,272
Beban Perjalanan Dinas	304,020,634	303,468,774
Beban Diklat Karyawan	124,120,440	117,247,825
Pemeliharaan Kendaraan	147,656,876	75,822,934
Beban Representasi	150,044,743	116,290,706
Tunjangan Kesehatan	199,203,526	111,852,394
Tunjangan Baju	-	50,300,000

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Beban Umum Lainnya	205,776,948	192,437,412
Jumlah	1,499,049,706	1,307,144,317
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Deposito	(8,400,884,652)	(9,788,727,309)
Pendapatan Jasa Giro	(44,655,391)	(41,873,210)
Jumlah	(8,445,540,043)	(9,830,600,519)
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(2,306,287,367)	(3,885,454,587)
Rugi (dibulatkan)	(2,306,287,000)	(3,885,454,000)
Kompensasi Kerugian Pajak Tahun Lalu	(9,884,442,000)	(5,998,988,000)
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(12,190,729,000)	(9,884,442,000)
Beban Pajak Penghasilan Kini:		
Final	(1,688,207,653)	(1,966,120,104)
Non Final	-	-
Beban Pajak Kini	(1,688,207,653)	(1,966,120,104)

Syariah

	2015	2014
Laba Sebelum Pajak	573,967,643	-
Perbedaan Temporer:		
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(6,538,163)	-
Kenaikan Cadangan Klaim	34,501,194	-
Kenaikan Imbalan Purna Jabatan	5,421,544	-
Beban Imbalan Pasca Kerja	-	-
Jumlah	33,384,575	-
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	148,359,490	-
Beban Perjalanan Dinas	25,673,528	-
Pemeliharaan Kendaraan	6,535,906	-
Beban Representasi	1,908,500	-
Tunjangan Kesehatan	5,375,698	-
Beban Umum Lainnya	42,354,362	-
Jumlah	230,207,484	-
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	(1,130,064,399)	-
Pendapatan Bagi Hasil Jasa Giro	(720,082)	-
Jumlah	(1,130,784,481)	-
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(293,224,779)	-
Rugi (dibulatkan)	(293,224,000)	-
Kompensasi Kerugian Pajak Tahun Lalu	-	-
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(293,224,000)	-

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak (lanjutan)

Syariah

	2015	2014
Beban Pajak Penghasilan Kini:		
Final	(144,014)	-
Non Final	-	-
Beban Pajak Kini	(144,014)	-

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

c. Pajak Tangguhan

Konvensional

	2015			
	1 Jan 2015	Dikreditkan ke ekuitas	Dibebankan ke laba rugi	31 Des 2015
Penyusutan Aset Tetap	74,213,019	-	34,858,324	109,071,342
Imbalan Kerja	13,650,376	(4,941,919)	6,352,745	15,061,202
Kenaikan Cadangan Klaim	169,424,112	-	254,105,228	423,529,340
Kenaikan Cadangan Purna Jabatan	-	-	146,375,000	146,375,000
Kerugian Fiskal yang dapat Dikompensasi	2,471,110,500	-	576,572,000	3,047,682,500
Jumlah	2,728,398,007	(4,941,919)	1,018,263,296	3,741,719,384

Syariah

Penyusutan Aset Tetap	-	-	1,634,541	1,634,541
Imbalan Kerja	-	-	-	-
Kenaikan Cadangan Klaim	-	-	8,625,299	8,625,299
Kenaikan Cadangan Purna Jabatan	-	-	1,355,386	1,355,386
Kerugian Fiskal yang dapat Dikompensasi	-	-	73,306,000	73,306,000
Jumlah	-	-	84,921,225	84,921,225

Jumlah Pajak Tangguhan Gabungan	2,728,398,007	(4,941,919)	1,103,184,522	3,826,640,610
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Konvensional

	2014*			
	1 Jan 2014	Dikreditkan ke ekuitas	Dibebankan ke laba rugi	31 Des 2014
Penyusutan Aset Tetap	16,769,820	-	57,443,199	74,213,019
Imbalan Kerja	15,238,138	(7,126,002)	5,538,240	13,650,376
Kenaikan Cadangan Klaim	55,926,318	-	113,497,794	169,424,112
Kerugian Fiskal yang dapat Dikompensasi	1,499,747,000	-	971,363,500	2,471,110,500
Jumlah	1,587,681,276	(7,126,002)	1,147,842,733	2,728,398,007

* Setelah Penyajian Kembali

16. EKUITAS

	2015	2014*
Penyertaan Modal	145,200,000,000	100,200,000,000
Cadangan Umum	846,259,220	-
Saldo Laba - Konvensional	1,700,757,435	2,386,623,549
Saldo Laba - Syariah	432,731,979	-
Keuntungan pengukuran kembali		
imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	36,203,763	21,378,005
Jumlah Ekuitas	148,215,952,397	102,608,001,554

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp145.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp200.000.000.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000.000, Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke tiga dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp45.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2015.

Sehingga komposisi modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	14,500	10,000,000	145,000,000,000	99.86%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.14%
Jumlah	14,520	20,000,000	145,200,000,000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 55 tanggal 30 April 2015, para pemegang saham menyetujui adanya Persetujuan Penggunaan Laba Bersih tahun 2014 dengan rincian Cadangan Umum yang diwajibkan sebesar 50%, Dividen sebesar 70% dari sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan umum, dan Tantiem dan Bonus sebesar 30% dari sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan umum.

Analisis Gearing Ratio

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin dalam melakukan kegiatan penjaminan.

* Setelah Penyajian Kembali

16. EKUITAS (lanjutan)

Analisis Gearing Ratio (lanjutan)

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

$$\begin{aligned} \text{GR Produktif} &= \frac{398,924,411,474}{148,215,952,397} = 2,69x \\ \text{Total GR} &= \frac{1,052,790,723,060}{148,215,952,397} = 7,10x \end{aligned}$$

Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2015 untuk yang produktif sebesar 2,69x dan secara total sebesar 7,10x.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

17. IMBAL JASA PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
	Rp	Rp
Imbal Jasa Jaminan/Kafalah	15,570,601,174	6,300,164,188
Beban <i>Fee Based Income</i> Bank	(40,131,115)	(20,498,694)
Beban Komisi Agen	(2,016,810,975)	(732,507,308)
Restitusi IJP	(323,926,561)	(53,179,740)
Management <i>Fee</i>	422,572,067	191,644,192
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	13,612,304,590	5,685,622,638

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJP kredit umum dibayar sekaligus di muka.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) dengan batas waktu maksimal 4 tahun.

18. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Pendapatan Bunga Deposito	9,530,949,051	9,788,727,309
Jumlah Pendapatan Bunga Deposito	9,530,949,051	9,788,727,309

19. BEBAN KLAIM

Beban klaim per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Beban Klaim	4,319,411,113	913,359,561
Beban Cadangan Klaim	1,730,575,103	677,696,449
Beban Regaransi	4,508,530,386	1,999,441,553
Jumlah Beban Klaim	10,558,516,602	3,590,497,563

20. BEBAN USAHA

Beban usaha per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014*
Beban Operasional	1,043,438,276	823,144,129
Beban Sumber Daya Manusia	7,019,827,177	5,843,122,128
Beban Administrasi Kantor dan Umum	1,832,071,480	1,414,672,148
Jumlah Beban Usaha	9,895,336,933	8,080,938,405

Rincian Beban Operasional

	2015	2014
Beban Promosi	516,586,029	339,724,272
Beban Perjalanan Dinas	329,694,162	303,468,774
Beban Kendaraan Dinas	197,158,085	179,951,083
Jumlah Beban Operasional	1,043,438,276	823,144,129

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Rincian Beban Sumber Daya Manusia adalah :

	2015	2014*
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas	72,000,000	-
Gaji dan Tunjangan Komisaris	920,525,000	764,508,010
Gaji dan Tunjangan Direksi	2,716,717,831	2,347,348,898
Gaji dan Tunjangan Karyawan	3,127,985,248	2,560,360,428
Beban Imbal Pasca Kerja	45,178,658	50,656,967
Beban Pengembangan SDM	137,420,440	120,247,825
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	7,019,827,177	5,843,122,128

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum adalah :

	2015	2014
Beban Administrasi	796,752,398	680,530,870
Beban Sewa	-	71,600,000
Beban Komunikasi & Energi	87,647,188	102,776,889
Beban Penyusutan & Amortisasi Aset	466,390,983	309,747,367
Beban Pemeliharaan & Asuransi Aset	206,589,326	55,750,851
Beban Pajak	11,129,025	1,828,759
Beban Umum	263,562,560	192,437,412
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	1,832,071,480	1,414,672,148

* Setelah Penyajian Kembali

21. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Pendapatan non operasional per 31 Desember 2015 dan 2014 terdiri dari:

	2015	2014
Pendapatan Jasa Giro	45,375,473	41,873,210
Pendapatan Subrogasi	149,537,965	29,541,282
Pendapatan Lainnya	60,355,890	2,080,736
Jumlah Pendapatan Non Operasional	255,269,328	73,495,228
Biaya Lain-Lain	-	(5,907,183)
Jumlah Beban Non Operasional	-	(5,907,183)
Jumlah Pendapatan Non Operasional	255,269,328	67,588,045

22. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

23. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Posisi Keuangan Konvensional
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konvensional
3. Laporan Perubahan Ekuitas Konvensional
4. Laporan Arus Kas Konvensional
5. Laporan Posisi Keuangan Unit Usaha Syariah
6. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Unit Usaha Syariah
7. Laporan Perubahan Ekuitas Unit Usaha Syariah
8. Laporan Arus Kas Unit Usaha Syariah